

Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Karawang 2021-2025

Irma Irmawana ^{a,1}, Lilis Lasmini ^{b,2}, Novy Trianthy Noegraha ^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, 41361, Indonesia



¹ak22.irmawana@mhs.ubpkarawang.ac.id; ²lilislasmini@ubpkarawang.ac.id ;

³novy.noegraha@ubpkarawang.ac.id

*korespondensi author

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel

Dikirim: 22-4-2026

Direvisi: 28-4-2026

Diterima: 29-4-2026

Kata Kunci

Pendapatan Asli Daerah, kontribusi PAD, pendapatan daerah, pembangunan berkelanjutan, SDGs.

ABSTRAK

Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur keuangan dan arah pembangunannya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penanda kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta sejauh mana pendapatan daerah mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen pendukung, wawancara dilakukan dengan pihak BPKAD Kabupaten Karawang dan studi kepustakaan dilakukan melalui buku, jurnal, website, dan laporan penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, memilih, menyusun, menjelaskan data, lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 34%, sehingga tergolong cukup baik. Namun, ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi, yaitu rata-rata 64%. Dari sisi belanja, serapan belanja modal rata-rata mencapai 91%, tetapi kontribusinya terhadap total belanja menurun hingga 12% pada tahun 2025. Pendapatan daerah tetap digunakan untuk mendukung program SDGs, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD dan penguatan belanja modal perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY.



1. Pendahuluan

Otonomi daerah pada dasarnya lahir dari kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tujuannya cukup jelas, yaitu menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui kebijakan ini, Pemerintah daerah pada dasarnya memberi ruang yang lebih luas untuk mengelola pemerintahan sekaligus mengelola keuangan daerahnya sendiri (Nurrahmadani et al., 2024). Namun, kewenangan yang lebih luas itu juga membawa tuntutan yang tidak ringan. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus lebih serius mengoptimalkan PAD (Cinta et al., 2024). Di lain sisi, otonomi daerah bukan semata-mata soal pemberian izin. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tidak semua daerah mempunyai kapasitas fiskal, kualitas birokrasi, atau potensi ekonomi yang sama (Jejen et al., 2022).

Pendapatan Asli Daerah atau PAD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pada dasarnya merujuk pada penerimaan yang bersumber dari potensi asli yang dimiliki oleh daerah itu sendiri (Di et al., 2023). Dalam praktiknya, pendapatan daerah tidak hanya berasal dari PAD, tetapi juga dari dana perimbangan serta pendapatan sah lainnya, seperti dana transfer pusat bahkan provinsi, hibah, dan pendapatan lain yang diakui secara hukum (Nuzulul Siswo Abdulaziz et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, susunan pendapatan ini sebenarnya menunjukkan seberapa kuat kapasitas fiskal suatu daerah. Dari sana bisa terlihat apakah sebuah wilayah cukup mampu membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik tanpa terlalu bergantung pada pihak luar, dan menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang (Kontribusi et al., 2025).

Sejalan dengan hal itu, *Sustainable Development Goals (SDGs)* hadir sebagai agenda global yang mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya menciptakan pekerjaan yang layak dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dalam jangka panjang (Ashilah et al., 2024). Dalam konteks daerah, arah pembangunan seperti ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatannya sendiri. Komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung pencapaian SDGs tercermin dari raihan penghargaan pada ajang *Indonesia's SDGs Action Awards 2025*. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada 19 November 2025 tersebut, Kabupaten Karawang berhasil masuk sebagai salah satu dari tiga pemerintah kabupaten terbaik di Indonesia dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Adhi et al., 2025).

Karawang memiliki potensi PAD yang besar karena ditopang basis industri yang kuat. Namun, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih berada pada kategori cukup, sementara ketergantungan pada dana transfer cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Karawang sudah cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan untuk menopang pembangunan berkelanjutan secara lebih mandiri.

Setiap daerah memiliki kondisi fiskal yang tidak sama. Studi sebelumnya di Kabupaten Konawe Selatan memperlihatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih tergolong cukup rendah, padahal daerah tersebut memiliki potensi pendapatan yang sama, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Jejen et al.,

2022). Akibatnya, tingkat kemandirian fiskal daerah belum benar-benar tercapai secara optimal.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih belum optimal dan cenderung berada pada kategori sedang hingga rendah, seperti yang terjadi pada Kota Padang, kontribusi PAD tergolong sedang (Kontribusi et al., 2025), sedangkan di Kabupaten Konawe Selatan kontribusinya relatif rendah (Jejen et al., 2022). Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada kontribusi PAD dan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan pencapaian SDGs masih terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kontribusi PAD dan kemandirian fiskal dengan memasukkan perspektif pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2. Tinjauan Pustaka

Fiscal Desentralization Theory

Desentralisasi fiskal adalah kebijakan yang sangat signifikan dalam pemerintahan di Indonesia dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan mendorong pemerataan pembangunan antardaerah (Kelola et al., 2025). Salah satu wujud paling nyata dari kebijakan tersebut adalah pemberian hak terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah secara mandiri, yang dikenal sebagai otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal (Dana et al., 2023). Teori desentralisasi fiskal pada dasarnya menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan terhadap pengelolaan keuangan daerah berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan bertujuan membuat layanan publik berjalan lebih efisien dan efektif (Herman et al., 2024). Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sesuai kebutuhan dan potensi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Effect et al., 2025).

Teori desentralisasi fiskal sangat relevan dengan penelitian karena membahas kewenangan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, termasuk melalui PAD. Dalam penelitian ini, PAD digunakan untuk melihat tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Karawang serta perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya program yang berkaitan dengan SDGs. Oleh karena itu, teori desentralisasi fiskal digunakan sebagai grand theory karena menjelaskan hubungan antara pengelolaan keuangan daerah, kontribusi PAD, kemandirian fiskal, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Pendapatan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah, pada kenyataannya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan masing-masing daerah. Kuat atau lemahnya kemampuan ekonomi daerah biasanya terlihat dari seberapa jauh daerah tersebut mampu membiayai kebutuhan pembangunannya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat (Dadang et al., 2021). Pendapatan terhadap daerah merupakan seluruh kewenangan pemerintah daerah yang menambah pendapatan bersih dalam satu tahun periode. Secara umum, komponennya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah (Pajak et al., 2025). Susunan ini penting, karena dari sana bisa terlihat seberapa kuat daerah dalam menopang layanan publik dan pembangunan.

PAD pada dasarnya sumbernya bukan hanya dari pajak dan retribusi daerah, dari hasil usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sampai pendapatan lain yang diakui sah menurut ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN. Pemerintah pusat pada dasarnya berupaya menjaga agar daerah tetap memiliki kapasitas fiskal yang memadai, terutama ketika kemampuan pendapatan asli daerah belum cukup kuat untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. (Jejen et al., 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat berperan penting, hal tersebut mencerminkan kemampuan fiskal suatu dalam menyediakan layanan publik dengan mandiri (Halimah et al., 2025). Ketika kontribusi PAD meningkat, biasanya pemerintah daerah juga mempunyai ruang gerak yang lebih leluasa untuk menentukan prioritas pembangunan. Ketika kemampuan keuangannya lebih kuat, pemerintah daerah mempunyai ruang yang lebih leluasa untuk menentukan prioritas, misalnya memperbaiki jalan lingkungan, menambah fasilitas puskesmas, atau mendukung kegiatan pendidikan sesuai kondisi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan (Audi Fazhillah et al., 2024).

Dalam praktiknya, PAD berperan besar dalam mendorong berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial (Revolian et al., 2024). Oleh karena itu, PAD menempati posisi yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Suprpto et al., 2024).

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya memperlihatkan seberapa besar persentase penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah. Jadi, semakin tinggi kontribusi ini, biasanya akan tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Untuk menilai besar kecilnya kontribusi itu, pengukuran umumnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah. Dalam penelitian ini, klasifikasi kontribusi juga menggunakan pedoman tersebut karena cukup sering dijadikan rujukan dalam berbagai kajian keuangan daerah (Halimah et al., 2025).

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Rentang Persentase Kontribusi (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat kurang
>10,00 – 20,00	Kurang
>20,00 – 30,00	Sedang
>30,00 – 40,00	Cukup baik
>40,00 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Diadaptasi dari pedoman penilaian kinerja keuangan daerah serta berbagai literatur keuangan daerah.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Alasannya cukup jelas, karena kenaikan PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik untuk membiayai pengeluarannya tanpa bergantung pada dana transfer pusat (Maharani et al., 2025).

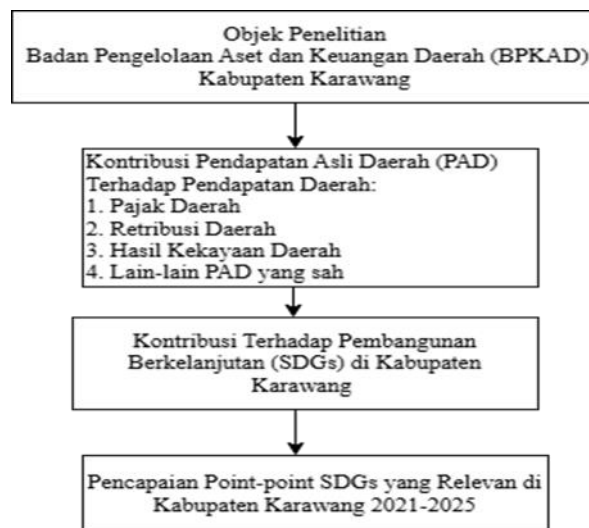
Sustainability Development Goals (SDGs)

Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat positif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), apalagi di tengah kebijakan desentralisasi administratif yang dilaksanakan di banyak negara, termasuk Indonesia (Matteis et al., 2021). Pemerintah daerah justru berada di posisi yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, konsep pembangunan berkelanjutan juga menekankan bahwa strategi pembangunan perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dijadikan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah (Kusuma et al., 2023). Selaras dengan hal tersebut, *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah agenda pembangunan berkelanjutan dan disahkan pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. Agenda ini ada 17 tujuan dengan 169 target program yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 (Maulida et al., n.d.).

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan yang saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seluruh tujuan tersebut dirancang sebagai kerangka pembangunan global yang menempatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam posisi yang sama penting. Adapun 17 tujuan tersebut meliputi: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) udara bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) mengurangnya kesenjangan, (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem laut, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, ketujuh belas tujuan SDGs tidak hanya merupakan daftar agenda pembangunan, melainkan membentuk suatu kerangka yang komprehensif karena mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Oleh karena itu, SDGs dipahami sebagai arah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Jadi, SDGs bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Zen et al., 2025).

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang tahun 2021 hingga 2025. Data tersebut didukung oleh studi literatur yang relevan, khususnya yang membahas desentralisasi fiskal dan kebijakan transfer dana daerah (Dana et al., 2023). Sumber literatur yang digunakan meliputi website, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian (Andriyani et al., 2025). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang berinisial Y. Informan tersebut dipilih karena memiliki pemahaman langsung mengenai pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan daerah, sehingga relevan dengan fokus penelitian tentang kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui buku, jurnal, website, dan laporan penelitian yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025 (dalam jutaan rupiah)

PAD	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak daerah	1.013.542,40	1.230.158,74	1.349.978,38	1.430.848,98	1.649.385,42
Hasil retribusi daerah	68.939,04	41.279,50	66.244,51	330.346,02	398.637,14

Hasil pengelolaan kekayaan daerah	7.946,10	10.181,33	10.906,69	10.980,21	11.917,02
Lain-lain PAD yang sah	561.423,30	336.163,44	335.382,49	54.105,59	44.817,86
Total PAD	1.651.850,84	1.617.783,01	1.762.512,07	1.826.280,80	2.104.757,43

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021-2025 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 2, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang selama periode 2021 sampai 2025 cenderung menunjukkan arah yang meningkat. Nilai total PAD tercatat naik dari Rp 1,65 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 2,10 triliun pada tahun 2025, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Setelah itu, angkanya kembali bergerak naik pada tahun 2023 hingga 2025. Pola ini setidaknya memberikan gambaran kapasitas fiskal daerah mulai membaik, atau paling tidak semakin stabil dibandingkan periode sebelumnya. Jika dilihat lebih rinci, pajak daerah masih menjadi komponen yang paling dominan. Kenaikannya juga cukup konsisten, dari Rp 1,01 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 1,65 triliun pada tahun 2025. Angka ini menampilkan bahwa PAD Kabupaten Karawang, pada kenyataannya, masih sangat bergantung pada sektor pajak. Jadi, sumber kekuatan fiskal daerah belum banyak berubah. Beban utamanya tetap ditopang oleh penerimaan pajak, sehingga kontribusinya sangat menentukan terhadap kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, retribusi daerah menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif. Meski begitu, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi pergerakan yang sangat signifikan. Nilainya meningkat dari Rp66,24 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp330,35 miliar pada tahun 2024, lalu kembali naik menjadi Rp398,64 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, komponen dari lain-lain PAD yang sah justru bergerak ke arah sebaliknya. Jika pada tahun 2021 nilainya masih mencapai Rp561,42 miliar, maka pada tahun 2025 jumlah tersebut turun cukup tajam menjadi Rp44,82 miliar. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih menjadi komponen dengan nilai paling kecil dibandingkan unsur PAD lainnya. Dengan kondisi tersebut, struktur PAD Kabupaten Karawang belum sepenuhnya merata karena masih sangat bergantung pada pajak daerah, sedangkan sumber pendapatan lain belum memberikan kontribusi yang seimbang.

Kontribusi PAD terhadap SDGs terlihat dari perannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD dapat mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat dapat menjadi sumber dana untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan fasilitas daerah. Dengan demikian, semakin optimal PAD yang diperoleh, semakin besar pula peluang Kabupaten Karawang untuk mendukung pencapaian SDGs secara mandiri.

Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Perhitungan ini terapkan untuk mengetahui peran PAD dalam struktur pendapatan daerah, sekaligus memberi gambaran tentang tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Karawang

selama periode penelitian. Adapun kalkulasi untuk kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah disajikan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Kontribusi et al., 2025).

Tahun	=	$\frac{1.651.850.841.989,00}{4.951.680.888.844,00}$	x 100%
2021	=	33%	
	=	$\frac{1.617.783.012.031,00}{4.802.598.262.500,00}$	x 100%
2022	=	34%	
	=	$\frac{1.762.512.066.251,91}{5.196.315.407.230,91}$	x 100%
2023	=	34%	
	=	$\frac{1.826.280.795.928,09}{5.686.622.840.656,09}$	x 100%
2024	=	32%	
	=	$\frac{2.104.757.433.545,00}{5.671.807.731.523,00}$	x 100%
2025	=	37%	
Rata-rata Kontribusi PAD	=	35%	

Tabel 3. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

Tahun	Total PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi PAD (%)	Kriteria
2021	1.651.850.841.989,00	4.951.680.888.844,00	33%	Cukup baik
2022	1.617.783.012.031,00	4.802.598.262.500,00	34%	Cukup baik
2023	1.762.512.066.251,91	5.196.315.407.230,91	34%	Cukup baik
2024	1.826.280.795.928,09	5.686.622.840.656,09	32%	Cukup baik
2025	2.104.757.433.545,00	5.671.807.731.523,00	37%	Cukup baik

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021-2025 (data diolah).

Berdasarkan tabel, kontribusi PAD Kabupaten Karawang selama tahun 2021 sampai 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil dan berada pada kategori cukup baik, dengan rata-rata kontribusi sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran cukup penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Pada tahun 2021, kontribusi PAD tercatat sebesar 33%, kemudian meningkat menjadi 34% pada tahun 2022 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 kontribusinya

menurun menjadi 32%, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya pendapatan transfer atau belum optimalnya pengelolaan PAD. Selanjutnya, pada tahun 2025 kontribusi PAD naik menjadi 37%, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam optimalisasi sumber-sumber PAD. Secara keseluruhan, kondisi ini memberikan dampak positif karena PAD dapat mendukung pembiayaan program pembangunan yang berkaitan dengan SDGs, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran ketergantungan keuangan kabupaten karawang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Dana Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Kontribusi et al., 2025).

Tahun			
2021	=	$\frac{3.029.850.463.855,00}{4.951.680.888.844,00}$	x 100%
	=	61%	
2022	=	$\frac{3.171.144.250.469,00}{4.802.598.262.500,00}$	x 100%
	=	66%	
2023	=	$\frac{3.425.547.340.979,00}{5.196.315.407.230,91}$	x 100%
	=	66%	
2024	=	$\frac{3.776.674.179.554,00}{5.686.622.840.656,09}$	x 100%
	=	66%	
2025	=	$\frac{3.485.887.177.924,00}{5.671.807.731.523,00}$	x 100%
	=	61%	
Rata-rata Ketergantungan Keuangan		=	64%

Tabel 4. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Total Pendapatan transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian
2021	3.029.850.463.855,00	4.951.680.888.844,00	61%
2022	3.171.144.250.469,00	4.802.598.262.500,00	66%
2023	3.425.547.340.979,00	5.196.315.407.230,91	66%
2024	3.776.674.179.554,00	5.686.622.840.656,09	66%
2025	3.485.887.177.924,00	5.671.807.731.523,00	61%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021-2025 (data diolah).

Rata-rata rasio ketergantungan daerah selama periode 2021 sampai 2025 mencapai 64%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan daerah masih ditopang oleh

transfer yang berasal dari pemerintah pusat, hal tersebut memperlihatkan tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dikatakan relatif rendah. Situasi seperti ini tentu tidak bisa dianggap sepele, karena keberlangsungan program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kestabilan dana transfer pusat.

Kontribusi PAD ini menunjukkan peran cukup signifikan, pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan prioritas. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang tahun 2021–2025, pemanfaatan pendapatan daerah tercermin pada beberapa program daerah serta kegiatan belanja modal yang mendukung pencapaian program SDGs, khususnya pada sektor infrastruktur, pembangunan, kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, serta upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada hubungan antara program-program tersebut dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Persentase Serapan Anggaran Terhadap Belanja modal 2021-2025.

Tahun	Anggaran Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Persentase Serapan (%)
2021	1.009.570.146.684,00	955.603.523.632,00	95%
2022	1.110.525.559.679,00	993.705.467.696,00	89%
2023	1.196.962.422.412,00	1.052.581.727.815,00	88%
2024	935.753.446.181,00	855.211.904.400,00	91%
2025	769.317.109.868,00	676.217.433.931,00	88%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021-2025 (data diolah).

Tingkat serapan belanja modal Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 tergolong tinggi dengan rata-rata 91%. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2021 yakni sebesar 95%, sementara pada tahun 2022, 2023, dan 2025 berada pada kisaran 88–89%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 91%. Tingginya tingkat serapan ini menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis, pemerintah daerah telah memiliki kapasitas yang cukup baik dalam merealisasikan program pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan. Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja modal dapat dikategorikan optimal karena realisasi mendekati pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 6. Analisis Kontribusi Belanja Modal Program Daerah 2021-2025

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Kontribusi (%)
2021	4.670.671.298.817,62	955.603.523.632,00	20%
2022	4.806.740.763.915,00	993.705.467.696,00	21%
2023	5.203.555.794.737,00	1.052.581.727.815,00	20%

2024	5.774.406.909.338,00	855.211.904.400,00	15%
2025	5.764.211.044.099,00	676.217.433.931,00	12%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2021-2025 (data analisis).

Berdasarkan Tabel 6, selama periode 2021–2025 menunjukkan penurunan. Pada periode 2021–2023, kontribusinya masih relatif stabil pada kisaran 20%–21%, hal tersebut menunjukkan jika pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap pembiayaan pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana pelayanan publik. Kondisi ini mencerminkan bahwa belanja modal masih menjadi salah satu instrumen paling penting dalam mendukung pembangunan daerah. Kontribusi belanja modal turun menjadi 15% pada tahun 2024 dan kembali menurun pada 2025 menjadi 12%, penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas anggaran ke belanja lain, terutama belanja operasional dan belanja wajib. Berdasarkan kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan daerah dalam mendukung pencapaian program pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang tahun 2021–2025, beberapa program dan kegiatan belanja modal memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Belanja modal seperti pembangunan gedung laboratorium, bangunan kesehatan, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, serta fasilitas kesehatan mendukung SDGs 3 berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan gedung pendidikan, perpustakaan, alat peraga praktik sekolah, bahan perpustakaan, serta program beasiswa dan pelatihan pendidikan berkaitan dengan SDGs 4 yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia suatu daerah.

Pada sektor infrastruktur dan pembangunan wilayah, kegiatan pembangunan jalan, jembatan, rambu-rambu lalu lintas, fasilitas umum, taman, serta sarana olahraga memiliki keterkaitan dengan SDGs 9 mengenai pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta SDGs 11 fokus pada upaya mewujudkan kota dan organisasi yang inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya pembangunan wilayah yang tidak hanya layak huni, tetapi juga harus menjamin akses yang adil bagi masyarakat terhadap perumahan, transportasi, ruang publik, dan lingkungan hidup yang baik. Pembangunan infrastruktur tersebut berperan dalam meningkatkan konektivitas sekaligus meningkatkan kualitas ruang publik bagi masyarakat.

Selanjutnya, kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan bangunan air, irigasi, pengembangan sumber air, instalasi air bersih, pengolahan air limbah, instalasi pengolahan sampah, serta bangunan penampung sampah memiliki keterkaitan dengan SDGs 6. Sementara itu, SDGs 12 fokus pada pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian pembangunan bangunan pengaman sungai atau pantai serta program penanggulangan bencana alam mendukung SDGs 13 terkait mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, sementara program bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berkaitan dengan SDGs 1 fokus pada upaya menghapus kemiskinan dalam segala kondisi serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Demikian, berbagai program

pembangunan daerah dalam LRA Kabupaten Karawang menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap beberapa tujuan SDGs di tingkat daerah.

Evaluasi pembangunan berkelanjutan oleh Pemda Karawang dapat dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, Renja OPD, dan Perubahan RKPD. Dokumen tersebut memuat arah pembangunan, prioritas program, indikator kinerja, target capaian, pagu anggaran, sumber pendanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2025, evaluasi dilakukan untuk melihat capaian target program dan kegiatan pembangunan daerah sampai Triwulan I, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran berikutnya. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Karawang tahun 2025 yang menekankan tata kelola pemerintahan yang bersih serta infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan data PAD 2021–2025, PAD berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang mendukung SDGs, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya, PAD membantu memperkuat pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Karawang. Namun, karena kontribusi PAD rata-rata baru mencapai 34% dan dana transfer masih sebesar 64%, Pemda Karawang perlu terus mengoptimalkan PAD agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih mandiri, terarah, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Karawang 2021 hingga 2025 dapat dikatakan berada pada tingkat yang cukup baik. Rata-ratanya mencapai sekitar 34%, sehingga menunjukkan bahwa PAD sudah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam struktur pendapatan daerah, meski belum menjadi sumber yang paling dominan. Angka ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam struktur pendapatan daerah tergolong cukup berarti dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Menariknya, pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan, yang dapat dibaca sebagai sinyal perbaikan dalam upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dari sisi belanja, rata-rata serapan belanja modal dapat dikatakan cukup tinggi, yakni sekitar 91%. Artinya, anggaran yang telah dialokasikan umumnya berhasil direalisasikan dengan baik.

Meski begitu, kontribusi belanja modal terhadap total belanja daerah justru cenderung menurun, dan pada tahun 2025 hanya berada di angka 12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal tetap terserap, porsi dalam keseluruhan belanja daerah semakin mengecil. Penurunan tersebut terjadi karena realisasi belanja modal menurun, sementara total belanja daerah masih tetap tinggi. Dengan kata lain, ada kecenderungan pergeseran alokasi anggaran ke belanja operasional dan belanja wajib. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kinerja PAD sudah cukup baik, alokasi untuk investasi pembangunan jangka panjang masih terbatas, sehingga perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).

6. Saran

Pemerintah Kabupaten Karawang disarankan untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber PAD, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah, agar tingkat kemandirian fiskal meningkat. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga proporsi belanja modal agar

tidak terus menurun, karena belanja modal berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang selaras dengan SDGs. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sinkronisasi antara kebijakan anggaran, prioritas pembangunan daerah, dan indikator pencapaian SDGs agar manfaat pendapatan daerah dapat dirasakan lebih langsung oleh masyarakat.

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karawang tahun 2021–2025 dan melibatkan satu informan dari BPKAD. Oleh karena itu, hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi program pembangunan secara menyeluruh. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian, menambah sumber data, dan memperdalam analisis mengenai peran PAD dalam mendukung pembangunan daerah serta pencapaian SDGs.

Daftar Pustaka

- Andriyani, T., Dilla, D. R., & Prayoga, R. O. (2025). Volume Ii No . 1 (Januari 2025): Srodja Kemandirian Keuangan Daerah : Studi Kasus Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
- Ashilah, N., & Herman, R. (2024). Ekonomi Yang Inklusif Serta Berkelanjutan : Analisis Keuangan Daerah , Kemiskinan , Teknologi Untuk Mewujudkan Sdgs 2030 Masruri Muchtar Pardomuan Robinson Sihombing Abstrak. 9, 120–137.
- Audi Fazhillah, & Nurlaila Nurlaila. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kecamatan Kotarih. Jurnal Riset Akuntansi, 2(2), 22–35. <https://doi.org/10.54066/Jura-Itb.V2i2.1694>
- Beritapasundan, P. Adhi-20 N. (2025). No Title. Beritapasundan. <https://beritapasundan.com/karawang-raih-penghargaan-indonesias-sdgs-action-awards-2025/>
- Cinta, B., Putri, M., Kartini, D. S., & Akbar, I. (2024). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Berbasis Entrepreneurial Government Untuk Sektor Kesehatan Di Kabupaten Karawang Tahun 2023. 6(5), 1670–1677.
- Dadang, A. (2021). 2021 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Ekonomi Daerah. 2(4), 80–84.
- Dana, T., Daerah, K. E., Realisasi, P., Pasca, A., & Disease-, C. (2023). Jurnal Administrasi Dan Kebijakan. 8(2).
- Di, D., Wilayah, S., & Malang, P. (2023). Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie). 7(02), 211–222.
- Effect, T. H. E., Fiscal, O. F., On, D., & Economic, R. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap The Effect Of Fiscal Decentralization On Regional Economic. 4(8), 2297–2314.
- Jejen, L., Baubau, P., & Retribution, R. (2022). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Analysis Of Contribution Of Regional Original Income To Regional Income Of South Konawe Regency.
- Kelola, T., Kinerja, D. A. N., Daerah, P., & Indonesia, D. I. (2025). 1 , 2 , 3 , 4. 10, 373–384.
- Khumaini, M. A. (2025). Pemkab Karawang Gratisan Pembayaran Pbb Untuk Areal Sawah. Antara Kantor Berita Indonesia. https://www.antaraneews.com/berita/5047933/pemkab-karawang-gratisan-pembayaran-pbb-untuk-areal-sawah?utm_source=chatgpt.com
- Kontribusi, A., Asli, P., & Pad, D. (2025). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas. 27(2), 161–171.
- Kusuma, C. A., & Yafiz, I. A. (2023). Integrasi Sdgs Pilar Pembangunan Sosial Dan Indikator Kinerja

- Pemerintah Daerah : Studi Kasus Di Kota Gorontalo. 6(1), 53–60.
- Maharani, Z. P. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer. 14, 1–12.
- Matteis, F. De. (2021). Administrative Sciences A Sustainability Management Model For Local Government : An Explanatory Study.
- Maulida, S. N., Nasution, S., & Adiyaksa, D. (N.D.). In Providing Access To Clean Water And Safe Sanitation In Bogor.
- Nurrahmadani, S. (2024). Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 21(2), 162–179.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. 1(8).
- Pajak, K., & Dalam, D. (2025). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas. 27(2).
- Revolian, A. A., & Rahmat, B. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Tentang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Tasikmalaya). Indonesia Journal Of Education And Humanity, 12(1), 256–270.
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). Jurnal Akuntansi Neraca, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.59837/Jan.V2i1.28>
- Zen, N. H., & Mageiasti, L. (2025). Gudang Untuk Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Penerapan (Sdgs) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dan Tantangan Serta Implementasi. 3, 775–785.